

Pola Konsumsi Dan Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Kabupaten Semarang

Muhammad Arif¹ , Ananda Putri Sabilla²

^{1,2} Department of Economics, Universitas Muhammadiyah Surakarta

 arif@ums.ac.id

Abstract

This study was conducted with the aim of analyzing and knowing the distribution of income and consumption patterns of the poor recipients of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Semarang Regency. This research is a qualitative research that uses a research sample of 64 respondents from 3 selected sub-districts, namely West Ungaran District (urban), Suruh District (transition), and Susukan District (rural). Data collection using primary and secondary data. Primary data through questionnaires, secondary data taken from BPS. The results of the analysis show that the distribution of the poor in Semarang Regency is concentrated in 3 Subdistricts, namely Suruh, Tenganan and Getasan Subdistricts, which are directly adjacent to Boyolali Regency and Salatiga City, so it can be concluded that this area is an area with a fairly high community mobility, and is influenced by economic activities from external areas. In the economic sector, it is known that the average economic growth in the Semarang Regency area is 5 percent, which is supported by the industrial sector. The results of the calculation of income and expenditure inequality with the Gini index approach show that the poor in Semarang Regency does not show any significant inequality. An interesting finding from this study is that debt is a problem that weighs heavily on the community so that their income has to be cut a lot for the purpose of paying off debt. It is also known that the distribution of debt needs is almost the same between regions, namely for consumption, schools and as business capital, thus to parse and overcome the problem of poverty, intervention is needed through social safety nets and higher education assistance programs for the poor in Semarang Regency.

Keywords: *Income Distribution, Consumption Patterns, Program Keluarga Harapan (PKH)*

Pola Konsumsi Dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Kabupaten Semarang

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui distribusi pendapatan dan pola konsumsi pada masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan sampel penelitian 64 responden dari 3 kecamatan terpilih yaitu Kecamatan Ungaran Barat (perkotaan), Kecamatan Suruh (transisi), dan Kecamatan Susukan (pedesaan). Pengambilan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer melalui kuisioner, data sekunder diambil dari BPS dan BDT tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang terkonsentrasi di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Suruh, Tenganan dan Getasan, yang berbatasan langsung dengan kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah ini merupakan daerah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, dan dipengaruhi oleh aktifitas ekonomi dari wilayah eksternal. Dalam sektor ekonomi, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Semarang adalah sebesar 5 persen yang ditopang dari sektor industri. Hasil perhitungan ketimpangan pendapatan dan pengeluaran dengan pendekatan indek gini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Semarang tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang berarti. Temuan menarik dari kajian ini

adalah bahwa hutang menjadi masalah yang sangat membebani masyarakat sehingga pendapatan mereka harus banyak terpotong untuk keperluan membayar hutang. Diketahui pula bahwa distribusi keperluan berhutang hampir sama antar wilayah yaitu untuk konsumsi, sekolah dan sebagai modal usaha, dengan demikian untuk mengurai dan mengatasi masalah kemiskinan diperlukan intervensi melalui jaring pengaman sosial dan program bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang.

Kata kunci: Distribusi Pendapatan, Pola Konsumsi, Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang akarnya telah menjalar dan berkembang hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia, begitu kompleksnya masalah ini dengan baik telah digambarkan oleh Nurske pada diagram setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) pada tahun 1953, dimana disebutkan bahwa kemiskinan (ketidakejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas, produktivitas yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak memiliki penghasilan yang layak sehingga porsi untuk tabungan dan investasi berkurang. Berkurangnya investasi berakibat pada rendahnya modal yang bermuara pada terjadinya ketidaksempurnaan pasar dan keterbelakangan. Hal tersebut terus bergerak melingkar sehingga tidak mempunyai ujung dan pangkal, sehingga permasalahan kemiskinan ini menjadi sulit untuk dipecahkan. Ahli lain menyebutkan bahwa kemiskinan adalah dampak negatif akibat pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain dapat diartikan bahwa kemiskinan akan tetap selalu ada seiring dengan adanya kegiatan ekonomi, dan semakin maju perekonomian suatu negara, maka masalah kemiskinan akan semakin dinamis dan makin sulit untuk diatasi.

Meski telah menjadi negara kelas menengah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dan PDB bernilai lebih dari US\$ 1000 triliun, masalah kemiskinan masih melekat dalam dinamika pembangunan negara Indonesia. Otonomi daerah yang dianggap sebagai jalan keluar masalah disparitas masih jauh dari keberhasilan, kantong-kantong kemiskinan masih tersebar baik di wilayah kota maupun daerah-daerah marginal membentuk insiden kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 adalah sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang dari Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Jumlah tersebut terbagi antara kemiskinan wilayah perkotaan dan perdesaan, yang mana diketahui bahwa dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2020 naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020). Penambahan jumlah kemiskinan ini terjadi akibat mulai diberlakukannya pembatasan – pembatasan aktivitas ekonomi sebagai respon dari merebaknya Covid-19 pada pertengahan tahun 2020, sebagai akibatnya aktifitas perekonomian mengalami kelesuan yang mengakibatkan gelombang pengangguran yang bermuara pada peningkatan kemiskinan.

Meminimalisir permasalahan tersebut, kehadiran Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan sebuah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program jaring pengaman sosial yang sedang digalakan besar-besaran oleh pemerintah karena dinilai mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Semarang tahun 2020 jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Semarang sebanyak 27009 kepala keluarga. Setiap keluarga mempunyai skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kondisi pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Makin tinggi pendapatan, makin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Riset ini mencoba melihat bagaimana kondisi masyarakat miskin penerima program PKH dan bagaimana mereka mengalokasikan bantuan tersebut untuk perbaikan kesejahteraan mereka.

2. Literatur Review

Pembahasan utama dalam kajian ini adalah bagaimana Pemerintah Indonesia hadir dalam upaya aktivasi jaring pengaman sosial terutama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

1.1. Sebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi ke miskinian kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran ekonomi.

Sharp dalam (Kuncoro, 1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Perbedaan kemajuan pembangunan suatu wilayah akan menimbulkan kesenjangan pendapatan, yang sekaligus akan menimbulkan perbedaan tingkat kemiskinan. Pada umumnya perkembangan ekonomi tidak terjadi secara serentak di semua sektor dan wilayah. Beberapa wilayah tumbuh dengan cepat, sedangkan beberapa sektor mengalami perkembangan yang lebih lambat. Teori-teori pertumbuhan regional sebagian besar merupakan konsep *unbalanced growth*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hirschman bahwa pertumbuhan tidak seimbang merupakan usaha pembangunan yang dipusatkan pada beberapa sektor yang mendorong berbagai sektor pada periode berikutnya. Perroux, 1955 menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai wilayah pada waktu yang sama. Pertumbuhan terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

1.2. Kemiskinan dan Karakteristiknya

Menurut (Jhingan, 2014), kemiskinan di negara sedang berkembang memiliki tiga ciri utama yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang menjadi tenaga kerja produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah ketinggalan zaman. Perbedaan karakteristik ini memiliki cara penanggulangan yang berbeda, sehingga dengan mengetahui karakteristik kemiskinan disuatu wilayah akan menentukan efektifitas program yang dilakukan.

Menurut Chambers (Chambers, 1997) bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut: (a) Kemiskinan (*poverty*) memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu; (b) Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka

yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar; (c) Masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya; (d) Lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka; (d) Masalah keterisolasian. Keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau sedang keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Shella Yulia Rosalina (2018) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)” dimana jumlah keluarga tahun 2015 dengan kepala keluarga mencapai 8.027, jumlah penduduk 28.044. Data penerima program PKH di Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2017 Rp 732.000.000 dengan penerima bantuan sebanyak 1.408 keluarga. Nominal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung sangat miskin. Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan metode deskriptif kualitatif. Dengan pengumpulan data yakni metode observasi wawancara dan dokumentasi yang akan dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PKH yakni sebagai berikut: 1) Target penetapan sasaran calon penerima PKH. 2) penetapan lokasi penerima PKH. 3) Proses persiapan pertemuan awal dan validasi. 4) Penyaluran bantuan. 5) Pembentukan kelompok peserta PKH. 6) Verifikasi komitmen. 7) Penangguhan dan pembatalan. 8) Pemutakhiran data. 9) Pengaduan peserta PKH. Program PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilihat dari fungsi dan tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam tercapai. Adanya PKH membantu mengurangi kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang meskipun belum maksimal.

Penelitian yang dilakukan Albertus Bayu dan Pambudi (2016) dengan judul “Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” dimana penerima PKH kondisi ekonomi lemah. Bantuan PKH yang dilakukan pemerintah membantu dalam mengurangi beban rumah tangga. Penerima PKH memiliki cara pola konsumsi agar tetap bertahan dalam kondisi kritis, cara tersebut: 1) Mengurangi asupan dan mutu makanan di banding hari normal. 2) Menggunakan alternative substansi hidup minimalis dan melakukan kegiatan untuk tetap bertahan hidup. 3) Mengandalkan relasi dan jaringan sosial.

Penelitian mengenai pola distribusi yang dilakukan oleh Mega Pramesti (2017) dengan judul “Pola Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2016” pada penelitian ini membahas pola distribusi, ketimpangan distribusi pendapatan menurut jenis pekerjaan, daerah tempat tinggal, pola konsumsi, dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Karanganyar 2016. Hasil analisis pada penelitian ini di Kabupaten Karanganyar termasuk pada kategori ketimpangan tingkat rendah, dengan pola analisis indeks menunjukkan penduduk nonpetani memiliki pendapatan yang merata dari penduduk di wilayah desa. Pendidikan menengah ke atas memiliki pendapatan yang merata daripada penduduk berpendidikan dasar. Pengeluaran pangan lebih merata daripada nonpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra Adisanjaya dan Risna (2017) dengan judul “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan dan Pengentasan Kemiskinan” memberikan hasil bahwa perlindungan sosial bersifat memberikan bantuan RTSM pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. PKH memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Program ini dilakukan pemerintah untuk menyediakan santunan minimal guna masyarakat mencapai kualitas hidup minimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif, Sidiq Poernomo, dkk (2019) dengan judul “Distribusi Spasial Masyarakat Terkategori Miskin dalam Basis Data Terpadu Kabupaten Sragen” memberikan hasil bahwa masyarakat miski di Kabupaten Sragen 40% kesejahteraannya terendah di Sragen teridentifikasi sejumlah 81.620 kepala rumah tangga dan sebanyak 250.294 individu, kemudian terjadi penambahan 30% data tahun 2017. Pada

Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Tanon jumlah masyarakat miskin teridentifikasi sebanyak 39% dari jumlah penduduk. Secara spasial kedua wilayah ini berdekatan langsung, sehingga dapat diketahui bahwa unsur geografis memiliki dampak pada banyaknya penduduk miskin di kedua wilayah tersebut.

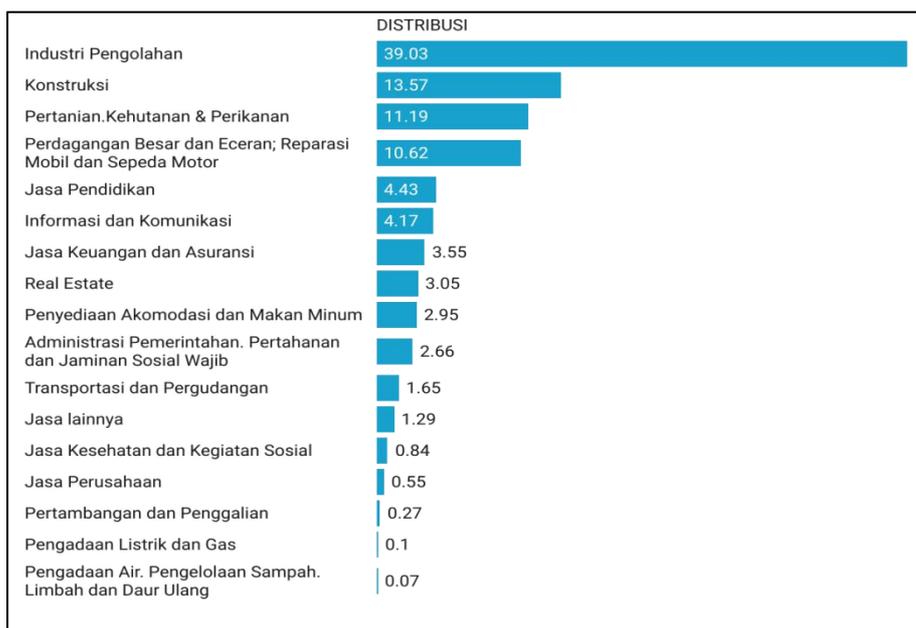
3. Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode survei langsung menggunakan kuisioner yang di berikan kepada 64 masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) pada 3 Kecamatan terpilih di Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Ungaran Barat (Zona Perkotaan), Kecamatan Suruh (Zona Transisi), Kecamatan Susukan (Zona Pedesaan). Data yang diperoleh dari kuisioner adalah: data diri dan demografi responden berupa, lingkungan tempat tinggal, usia responden, usia saat menikah, tingkat pendidikan terakhir, jenis tempat tinggal, kepemilikan tempat tinggal, untuk karekteristik ekonomi berupa, mata pencaharian, jenis pekerjaan, hambatan pekerjaan, sumber pendapatan, komposisi pengeluaran, pendapatan, bantuan, keperluan berhutang, asal hutang, kepemilikan aset rumah tangga. Untuk menganalisis distribusi pendapatan dan pengeluaran menggunakan analisis Indek Gini.

4. Hasil dan Pembahasan

1.3. Perekonomian Kabupaten Semarang

Kondisi perekonomian di Kabupaten Semarang cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan bernilai 5.5 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi dalam PDRB kabupaten Semarang Tahun 2020 ([Gambar 1](#)). Dominasi sektor industri di Kabupaten Semarang tidak terlepas dari posisi geografis wilayah ini yang cukup dekat dengan pelabuhan utama di Jawa Tengah yang memungkinkan terjadinya sirkulasi barang yang cukup efisien, sehingga Kabupaten Semarang berkembang menjadi wilayah industri dengan peran sentral di wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1. Distribusi PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2020 (Sumber: BPS 2020, diolah)

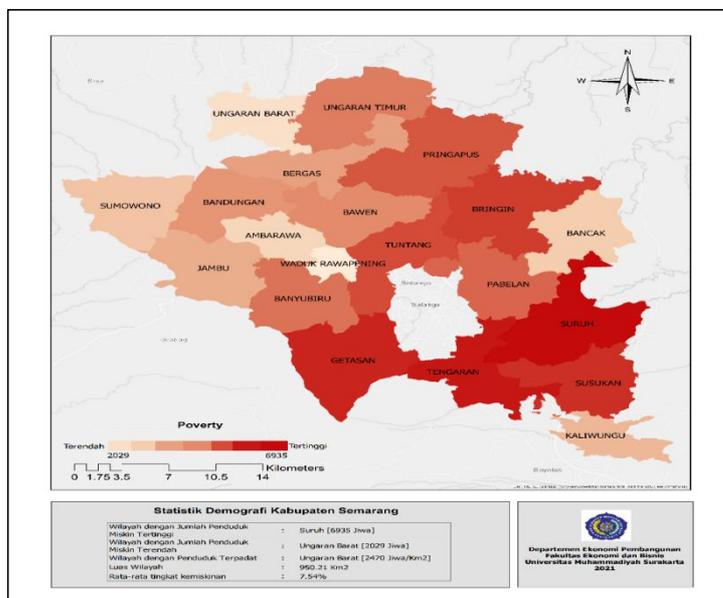
1.4. Profil Kemiskinan Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 1,65 juta jiwa pada tahun 2020, dengan kondisi ekonomi masing-masing penduduknya yang beragam. Tahun 2019, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Semarang diketahui sebesar 377.674 Rupiah/Kapita/Bulan. Garis Kemiskinan Kabupaten Semarang tersebut berada sedikit diatas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar

369.385 Rupiah/Kapita/Bulan. Adapun presentase penduduk miskin (P0) diketahui sebesar 7,04 persen, angka tersebut menurun sebesar 1,77 ribu jiwa atau 0,25 persen dari presentase penduduk miskin pada tahun sebelumnya dengan jumlah sebanyak 75,67 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskinnya sebesar 7,29 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang menempati peringkat ke enam kabupaten/kota dengan presentase penduduk miskin terkecil diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri untuk Presentase Penduduk Miskin (P0) termasuk cukup tinggi yaitu sebesar 10,80 persen.

1.5. Klasifikasi dan Distribusi Spasial Masyarakat Miskin Kabupaten Semarang

Distribusi spasial masyarakat miskin merupakan analisis yang dapat menggambarkan sebaran maupun pengelompokan wilayah yang menjadi konsentrasi penduduk miskin di Kabupaten Semarang. Dalam kajian ini data sebaran masyarakat miskin di peroleh dari sensus ekonomi dan sosial yang terangkum dalam Basis Data Terpadu (BDT), dari data BDT tersebut teridentifikasi sejumlah 90.349 Kepala Rumah Tangga dan sebanyak 309.296 individu masuk dalam kategori masyarakat kurang sejahtera pada tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 1,56%, diketahui jumlah Kepala Rumah Tangga menurun menjadi 90.171 dan individu menurun menjadi 304.451 jiwa.



Gambar 2. Sebaran Masyarakat Miskin Kabupaten Semarang
Sumber: Kemensos, BPS berbagai terbitan, diolah

Distribusi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang sebagaimana **Gambar 2** diketahui bahwa wilayah dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kabupaten Semarang terkonsentrasi di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Suruh, Tengaran dan Getasan, ketiga wilayah ini terletak di bagian selatan dan berbatasan langsung dengan kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah ini merupakan daerah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, karena terhubung dengan 2 wilayah sekaligus, maka dapat diambil hipotesa bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah-wilayah ini berhubungan dengan aktifitas ekonomi dari wilayah eksternal.

1.6. Ketimpangan Pendapatan dan Pengeluaran Penduduk Miskin Kabupaten Semarang

Distribusi pendapatan masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah analisis berdasarkan Indeks Gini melalui pendekatan pendapatan diketahui bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 0,191 hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang masih dalam kategori ketimpangan yang rendah. Lebih lanjut diketahui bahwa kecamatan dengan ketimpangan tertinggi adalah Kecamatan Ungaran Barat yaitu sebesar 0,226. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Suruh dengan ketimpangan pendapatan adalah sebesar 0.190. Terakhir Kecamatan yang paling rendah tingkat ketimpangan pendapatan dari beberapa kecamatan

yang di survei adalah Kecamatan Susukan dengan nilai ketimpangan pendapatan hanya sebesar 0,186.

Tabel 1 Indeks Gini Pendekatan Pendapatan Kabupaten Semarang

Pendapatan Total	Kecamatan Susukan	Kecamatan Suruh	Kecamatan Ungaran Barat
0,191	0,186	0,190	0,226

Sumber: Data Primer diolah

Hasil perhitungan Indeks Gini melalui pendekatan pengeluaran dapat dilihat dari ketimpangan pengeluaran masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi pada tiga kecamatan di Kabupaten Semarang dari hasil survei yaitu 0,245 hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran dalam kategori ketimpangan rendah. Berdasarkan Kecamatan yang di survei ketimpangan pendekatan pengeluaran yang paling besar adalah Kecamatan Suruh yaitu 0,235. Kemudian diikuti Kecamatan Ungaran Barat dengan nilai ketimpangan pengeluar sebesar 0,226 (ketimpangan rendah). Dari hasil survei Kecamatan dengan nilai ketimpangan paling rendah adalah Kecamatan Susukan yaitu 0.179 (ketimpangan rendah).

Tabel 2 Indeks Gini Pendekatan Pengeluaran Kabupaten Semarang

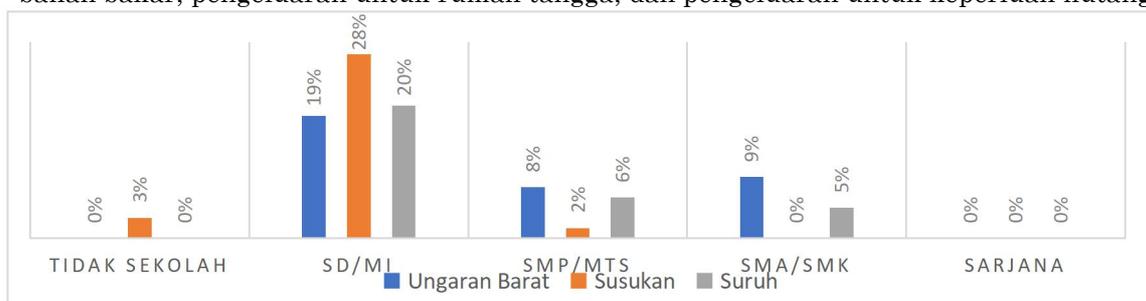
Pengeluaran Total	Kecamatan Susukan	Kecamatan Suruh	Kec. Ungaran Barat	Pangan	Non Pangan
0,245	0,179	0,235	0,226	0,237	0,339

Sumber: Data Primer diolah

Pengeluaran untuk konsumsi makanan masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan di wilayah analisis diketahui memiliki besaran yang lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Nilai ketimpangan dalam konsumsi makanan adalah sebesar 0,237 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan indek gini pada komoditas konsumsi nonmakanan yang bernilai 0,339. Mendasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Semarang memiliki pola konsumsi makanan yang lebih merata dibandingkan dengan pola konsumsi nonmakanan.

1.7. Analisis Kondisi Demografi Penduduk Miskin Kabupaten Semarang

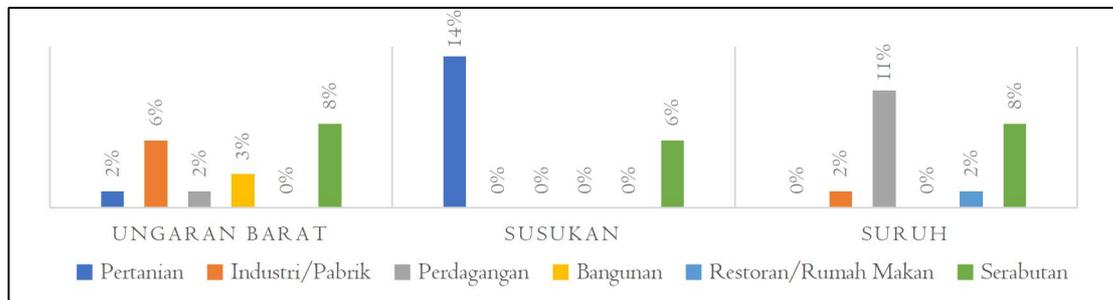
Mendasarkan hasil analisis data kuesioner diperoleh data-data statistik demografi yang menggambarkan bagaimana kondisi demografi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang berperan dalam terciptanya kondisi kemiskinan yang terjadi, di antara data tersebut adalah; pendidikan terakhir yang di tempuh, yang digunakan dalam melihat tingkat/kualitas manusia. Sedangkan dalam sektor ekonomi data yang dianalisis adalah; sebaran mata pencaharian masyarakat, pengeluaran untuk makan, pengeluaran untuk bahan bakar, pengeluaran untuk rumah tangga, dan pengeluaran untuk keperluan hutang.



Gambar 3. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Penduduk

Sumber: Data Primer, diolah

Tingkat pendidikan di seluruh wilayah penelitian didominasi oleh penduduk yang hanya bersekolah sampai jenjang sekolah dasar (SD/MI) (**Gambar 3**), hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas manusia pada masyarakat penerima PKH di Kabupaten Semarang, sebagai pilar utama terkait dengan modal manusia, seharusnya titik tekan pendidikan perlu lebih disasarkan pada kelompok masyarakat ini, karena dengan adanya peningkatan mutu dan jenjang pendidikan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga penghasilan mereka dapat meningkat dan kemiskinan mulai berkurang.



Gambar 4. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

Sumber: Data Primer, diolah

Analisis terkait dengan keberdayaan ekonomi, diawali dengan melihat sebaran jenis mata pencaharian masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam **Gambar 4**. Hasil survei menyebutkan bahwa terjadi perbedaan mata pencaharian masyarakat miskin perkotaan, perdesaan dan masyarakat yang tinggal di wilayah peralihan. **Gambar 4** menjelaskan bahwa masyarakat miskin perkotaan (Ungaran Barat) sebagian besar bekerja secara serabutan dan berprofesi sebagai buruh industri. Wilayah Ungaran Barat sebagai wilayah industri menawarkan banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Semarang, namun karena tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakatnya rendah maka sebagian besar dari mereka hanya mampu terserap sebagai buruh pabrik yang berpenghasilan rendah dan belum cukup dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Disisi lain, masyarakat yang tinggal di wilayah Perdesaan (Suruh) menggantungkan hidupnya dengan bertani, berbeda dengan tempat tinggal di perkotaan yang minim pertanian, wilayah perdesaan masih memiliki lahan pertanian dan sawah yang cukup luas, sehingga potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menekuni pekerjaan di bidang pertanian. Namun kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat petani di wilayah ini adalah belum masifnya teknologi pertanian, warga hanya mengandalkan alat sederhana dalam upaya pengolahan lahan milik mereka, sehingga hasil yang diperoleh pun belum cukup dalam pemenuhan kebutuhan mereka, hal ini diperparah oleh anomali dan perubahan iklim yang tidak menentu sehingga petani di wilayah ini sering mengalami gagal panen dan memperburuk kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Wilayah lain yang diamati dalam penelitian ini adalah wilayah peralihan/peri urban (Suruh), wilayah ini berada di pinggiran kota namun masih belum sampai di wilayah perdesaan. Perkerjaan masyarakat yang paling utama pada wilayah ini adalah sektor perdagangan dan sebagai pekerja serabutan, wilayah yang berada diantara kota dengan perdesaan memiliki keuntungan dari jalur distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat diwilayah ini memilih untuk menjadi perantara antara produsen produk pertanian di wilayah perdesaan dengan konsumen di wilayah kota. Adapun kendala yang dihadapi para pelaku jasa perdagangan di wilayah ini adalah tidak adanya kepastian akan produk hasil pertanian dari petani, sehingga harga komoditas pertanian sering sekali tidak stabil dan menyebabkan adanya dorongan kenaikan harga yang mengakibatkan inflasi.

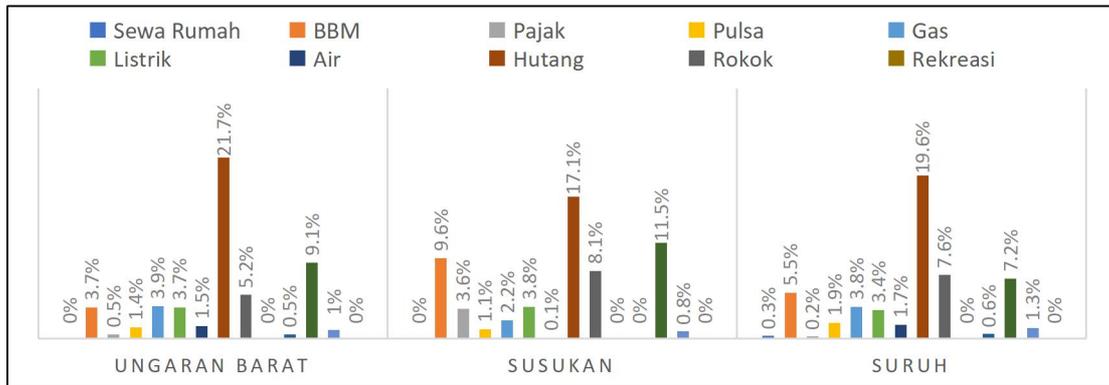


Gambar 5. Komposisi Pengeluaran Penduduk Miskin Kab. Semarang

Sumber: Data Primer, diolah

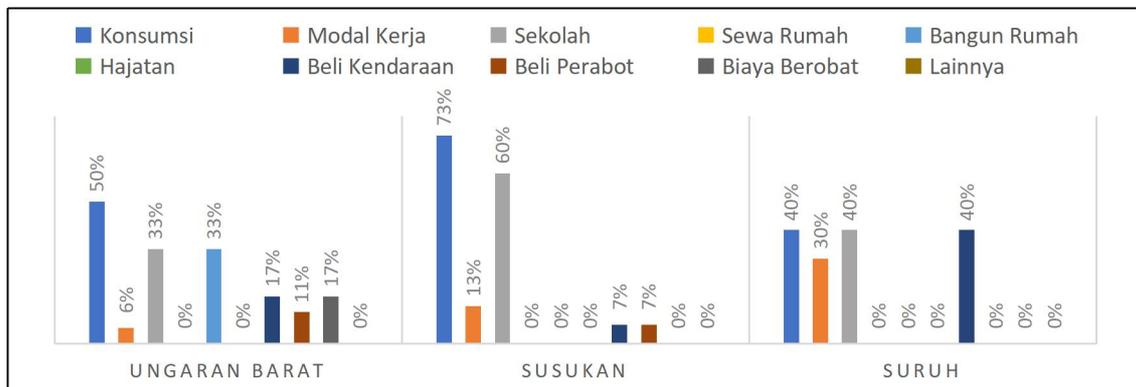
Dalam membelanjakan penghasilannya, masyarakat miskin di Kabupaten Semarang dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran untuk pangan dan non pangan, dimana hasil yang diperoleh sama di ketiga wilayah yaitu pengeluaran non makanan melebihi pengeluaran makanan (**Gambar 5**). Alokasi pengeluaran non pangan secara detil dapat dilihat dalam **Gambar 6**, dimana masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Semarang memiliki pola konsumsi yang sama, dimana diketahui bahwa pengeluaran terbesar di wilayah ini adalah untuk kebutuhan dalam membayar cicilan hutang, kemudian diikuti oleh pengeluaran untuk keperluan belanja

kebutuhan Rumah Tangga dan diikuti kebutuhan untuk belanja BBM serta konsumsi rokok.



Gambar 6. Komposisi Pengeluaran Non Makan Penduduk Miskin Kab. Semarang
Sumber: Data Primer, diolah

Temuan sebagaimana gambar 6 cukup menarik untuk diketahui lebih mendalam, bagaimana bisa masyarakat miskin di Kabupaten Semarang dapat terjebak dalam hutang sehingga menjadi pengeluaran yang paling dominan pada kelompok konsumsi non makanan. Mendasarkan hal tersebut analisis dilanjutkan dengan melihat keperluan apa yang dapat mendorong masyarakat miskin Kabupaten Semarang untuk berhutang.



Gambar 7. Keperluan Dalam Berhutang Penduduk Miskin Kab. Semarang
Sumber: Data Primer, diolah

Hasil analisis pada Gambar 7 menunjukkan bahwa distribusi keperluan berhutang hampir sama antar wilayah. Pada wilayah Ungaran Barat (Perkotaan) keperluan berhutang digunakan sebagian besar untuk kebutuhan konsumsi, kemudian secara berturut – turut diketahui keperluan berhutang dilakukan untuk kebutuhan membayar sekolah dan membangun rumah. Sementara itu keperluan berhutang di wilayah perdesaan sebagian besar dilakukan untuk konsumsi dan membayar sekolah serta sebagian kecil untuk modal kerja. Berbeda dengan wilayah kota dan desa, keperluan berhutang di wilayah peralihan lebih kompleks, diketahui bahwa keperluan berhutang digunakan untuk konsumsi, sekolah, membeli kendaraan dan untuk modal kerja.

Keperluan konsumsi muncul menjadi keputusan yang paling banyak dipilih masyarakat miskin untuk berhutang, hal ini cukup ironis dan diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat miskin tidak mencukupi untuk hanya sekedar membeli bahan konsumsi, sehingga mereka harus berhutang. Dengan demikian perlu adanya upaya peningkatan modal manusia yang berwujud keterampilan dan kesempatan kerja yang lebih luas agar masyarakat miskin di kabupaten Semarang dapat meningkatkan pendapatannya secara signifikan. Disisi lain tingginya pengeluaran hutang untuk sekolah menandakan mulai sadarnya masyarakat miskin akan pentingnya aspek pendidikan, sekolah yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini adalah pendidikan tinggi yang memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Dengan demikian intervensi perlu diberikan melalui jaring pengaman sosial agar kebutuhan konsumsi masyarakat miskin dapat terpenuhi minimal dapat mengurangi

ketergantungan hutang untuk keperluan konsumsi, selain hal tersebut skema bantuan pendidikan tinggi perlu dirumuskan dengan cermat sehingga dapat menysasar pada masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan, sehingga jumlah masyarakat terdidik semakin banyak yang akhirnya dapat membatu menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan jumlah masyarakat miskin.

2. Kesimpulan

Distribusi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang terkonsentrasi di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Suruh, Tengaran dan Getasan, ketiga wilayah ini terletak di bagian selatan dan berbatasan langsung dengan kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah ini merupakan daerah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, karena terhubung dengan 2 wilayah sekaligus, maka dapat diambil hipotesa bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah-wilayah ini berhubungan dengan aktifitas ekonomi dari wilayah eksternal. Dalam sektor ekonomi, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Semarang adalah sebesar 5 persen dengan penopang utama adalah sektor industri. Hasil perhitungan ketimpangan pendapatan dan pengeluaran dengan pendekatan indek gini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Semarang tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang berarti.

Temuan menarik dari kajian ini adalah bahwa hutang menjadi masalah yang sangat membebani masyarakat sehingga pendapatan mereka harus banyak terpotong untuk keperluan membayar hutang. Diketahui pula bahwa distribusi keperluan berhutang hampir sama antar wilayah yaitu untuk konsumsi, sekolah dan sebagai modal usaha, dengan demikian untuk mengurai dan mengatasi masalah kemiskinan diperlukan intervensi melalui jaring pengaman sosial dan program bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang.

Referensi

- [1] Arif, Muhammad; Nugroho, Sidiq Permono, dkk, 2019. *Distribusi Spasial Masyarakat Terkategori Miskin Dalam Basis Data Terpadu Kabupaten Sragen*, Jurnal Litbang Sukowati Vol 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- [2] Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Semarang
- [3] Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Semarang
- [4] Badan Pusat Statistik. 2019. *Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Kabupaten Semarang 2019*. BPS Kabupaten Semarang
- [5] Basis Data Terpadu. <http://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
- [6] Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. In *Whose reality counts? Putting the first last*.
- [7] Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- [8] Gilarso, T. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Kanisius. Yogyakarta
- [9] Jhingan, M. L. (2014). *The Economics of Development and Planning*. In *Pt Rajagrafindo Persada*.
- [10] Kuncoro, M. (1996). *Pembangunan Regional Di Indonesia: Beberapa Catatan Menjelang Abad Ke - 21. Unisia*.
- [11] Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomika Pembangunan* Edisi 4, Yogyakarta: STIE YKPN.
- [12] Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [13] Mankiw, N. G. (2010). *Macroeconomics (7th Ed)*. In *Worth Publishers*.
- [14] *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 / 1*. (2019).
- [15] Prakoso , Albertus Bayu dan Pambudi Handoyo. 2016. *Pola Konsumsi*

- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Volume 04 Nomer 01. Paradigma.*
- [16] Pramesti, Mega. 2017. *Pola Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar Pada Tahun 2016*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- [17] Risna Resnawaty, S. A. S. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, 4(1), 1–140.
- [18] Shella Yulia Rosalina. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam. *Journal of Economics*.
- [19] Sukirno, S. (2006). Teori Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta.
- [20] Sukirno, S. (2018). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. In *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*.
- [21] Tamawiwi, Kristin Nelawati. 2015. *Pola Konsumsi Masyarakat Miskin Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*. Vol 6 No 9. Ejournal UNSRAT.
- [22] Tim, S., & Percepatan, N. (2015). *Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)*. April.
- [23] Todaro, Michael P. (1990). *Economic Development in the Third World, Fourth Edition. Population and Development Review*.
- [24] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). In Diterjemahkan oleh Drs Haris Munandar, MA dan Puji AL, SE dari Buku *Economic Development Ninth Edition*. Jakarta: Erlangga.
- [25] Winarno, Sigit dan Sujuana Ismaya. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Pusaka Grafika. Bandung.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)